

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERUNTUKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Motivasi Penelitian	6
1.6. Kontribusi Penelitian	6
1.7. Proses Penelitian	7
1.8. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Tata Pemerintahan yang Baik atau <i>Good Governance</i>	10
2.1.2. Keuangan Daerah	11
2.1.3. Informasi Keuangan	13
2.1.4. Karakter Kualitatif Laporan Keuangan	14
2.1.5. Sistem Informasi	15
2.1.6. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	17
2.2. Dasar Hukum Mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	19
2.2.1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	19
2.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	20
2.2.3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	21
2.3. Penelitian Terdahulu	21
BAB III LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL PENELITIAN	23
3.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	23

3.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemda DIY	23
3.3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	25
3.4. SIKD Pada Pemda DIY	27
BAB IV RANCANGAN PENELITIAN STUDI KASUS	31
4.1. Rasionalitas Objek Penelitian	31
4.2. Desain Penelitian	31
4.3. Jenis Data	32
4.4. Teknik Pengumpulan Data	33
4.4.1. Wawancara Mendalam (<i>In depth interview</i>)	34
4.4.2. Pengumpulan Data Dengan Dokumen	35
4.5. Teknik Analisis Data	35
4.5.1. Reduksi Data	36
4.5.2. Penyajian Data atau <i>Data Display</i>	38
4.5.3. <i>Conclusion Drawing</i>	39
4.6. Keabsahan Data	39
BAB V PEMAPARAN TEMUAN	41
5.1. Evaluasi SIKD Pada Pemda DIY	42
5.1.1. Kesesuaian SIKD dengan PP No. 56 tahun 2005 tentang SIKD dan perubahannya yaitu PP No. 65 tahun 2010	43
5.1.2. Kesesuaian SIKD dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	49
5.1.3. Kesesuaian SIKD dengan PMK No. 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan	51
5.1.4. Kesesuaian SIKD dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya yang diatur dalam Permendagri No. 59 tahun 2007	51
5.2. Penyebab Belum Optimalnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	54
BAB VI RINGKASAN DAN PEMBAHASAN	59
6.1. Ringkasan	59
6.2. Pembahasan	61
6.2.1. Evaluasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pada Pemda DIY	62
6.2.2. Kendala Penyebab Belum Optimalnya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	83
BAB VII SIMPULAN DAN REKOMENDASI	93
7.1. Simpulan	93
7.2. Rekomendasi	97
7.3. Keterbatasan Penelitian	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Proses Analisis Tematik	37
--	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Tahapan Penelitian	7
Gambar 3.1. SIKD DIY untuk mendukung SIKD Nasional	30
Gambar 4.1. Bagan Proses Penjodohan Pola (<i>Pattern Matching</i>)	38
Gambar 4.2. <i>Cause Effect Diagram</i> atau Diagram Ishikawa	39
Gambar 5.1. Diagram Ishikawa untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada SIKD DIY	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Protokol Wawancara

Lampiran 2 Transkripsi Hasil Wawancara

Lampiran 3 Proses Analisis Penjodohan Pola

Lampiran 4 Proses Analisis Tematik